

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 15 Mei 2020



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, halaman 6	Jumat, 15 Mei 2020	Konstruksi Bisa Bangkit Lebih Cepat	Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Peter Frans mengatakan sampai kini sektor konstruksi cukup terpengaruh dengan pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19), kendati termasuk sektor yang dikecualikan dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
2	Timesmalang.com	Kamis, 14 Mei 2020	Kementerian PUPR RI: Renovasi Masjid Istiqlal Ditargetkan Selesai Akhir Juni 2020	Di tengah Pandemi Covid-19 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus berkomitmen menyelesaikan renovasi Masjid Istiqlal, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saat ini progres renovasi Masjid Istiqlal telah mencapai 89% dan ditargetkan selesai pada akhir Juni 2020. https://www.timesmalang.com/berita/125956/kementerian-pupr-ri-renovasi-masjid-istiqlal-ditargetkan-selesai-akhir-juni-2020
3	Timesjakarta.com	Kamis, 14 Mei 2020	Kementerian PUPR RI Tingkatkan Fasilitas RS Covid-19 Lamongan dan RSUD Biak Numfor	Setelah menyelesaikan pembangunan Fasilitas Penampungan/Observasi/Karantina di Pulau Galang, Kota Batam dan renovasi/rehabilitasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran untuk mendukung penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus memberikan dukungan untuk penyediaan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah.* https://www.timesjakarta.com/berita/125955/kementerian-pupr-ri-tingkatkan-fasilitas-rs-covid19-lamongan-dan-rsud-biak-numfor
4	Timesmalang.com	Kamis, 14 Mei 2020	Kementerian PUPR RI Selesaikan Fasilitas Penunjang PLBN Aruk, Motaain dan Skouw	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) menyediakan ruang usaha untuk mendukung keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menjaga perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan saat Pandemi COVID-19. Hal ini dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden sejak 2015 silam dimana Kementerian PUPR RI mulai mengembangkan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana zona penunjang untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, seperti pasar, rest area, warung makan, dan toserba di 3 dari 7 PLBN, yakni Aruk Provinsi Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PLBN Skouw di Papua. https://www.timesmalang.com/berita/125794/kementerian-pupr-ri-selesaikan-fasilitas-penunjang-plbn-aruk-motaain-dan-skouw
5	Inilahkoran.com	Kamis, 14 Mei 2020	Bupati dan DPRD Bogor Desak Kementerian PUPR Segera Bangunkan Huntap	Pemkab Bogor berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera membangun ribuan hunian tetap (Huntap) di Desa Sukaraksa, Cigudeg. Hal ini karena lahan perkebunan sawit seluas 33 hektare di Desa Sukaraksa telah diproses pembersihan lahan sebelum aktivitas pembangunan oleh pihak Kecamatan Cigudeg dibantu Korem 061 Surya Kencana. https://www.inilahkoran.com/berita/51538/bupati-dan-dprd-bogor-desak-kementerian-pupr-segera-bangunkan-huntap
6	Okezone.com	Kamis, 14 Mei 2020	Dukung Ekonomi Perbatasan, PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan ruang usaha untuk mendukung

			Bangun Pasar hingga Rest Area di PLBN	keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menjaga perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan saat Pandemi Covid-19. https://economy.okezone.com/read/2020/05/14/320/2214013/dukung-ekonomi-perbatasan-pupr-bangun-pasar-hingga-rest-area-di-plbn
7	Okezone.com	Kamis, 14 Mei 2020	Jadi Jalur Logistik, PUPR Mantapkan Jalan Sabuk Merah di Perbatasan NTT	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan kesiapan dan kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan, baik jalan tol maupun jalan nasional untuk mendukung jalur logistik kebutuhan pokok serta pergerakan karena kepentingan khusus yang diizinkan Pemerintah selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pandemi COVID-19 dan kebijakan larangan Mudik Lebaran Tahun 2020. https://economy.okezone.com/read/2020/05/14/320/2213980/jadi-jalur-logistik-pupr-mantapkan-jalan-sabuk-merah-di-perbatasan-ntt

Judul	Konstruksi Bisa Bangkit Lebih Cepat	Tanggal	Jumat, 15 Mei 2020
Media	Bisnis Indonesia, halaman 6		
Resume	Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Peter Frans mengatakan sampai kini sektor konstruksi cukup terpengaruh dengan pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19), kendati termasuk sektor yang dikecualikan dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB).		

| PEMULIHAN EKONOMI |

KONSTRUKSI BISA BANGKIT LEBIH CEPAT

Bisnis, JAKARTA — Ikatan Nasional Konsultan Indonesia meyakini sektor konstruksi bisa bangkit lebih cepat daripada sektor lain setelah pandemi virus corona berakhir.

Agne Yasa
agne.yasa@bisnis.com

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Peter Frans mengatakan sampai kini sektor konstruksi cukup terpengaruh dengan pandemi *Coronavirus disease* 2019 (Covid-19), kendati termasuk sektor yang dikecualikan dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Namun, konstruksi paling cepat bangkit pada era pandemi ini," katanya melalui konferensi video di Jakarta, Kamis (14/5).
Dengan nilai lebih bisa pulih lebih cepat, dia menegaskan sektor konstruksi termasuk di dalamnya kontraktor dan konsultan dapat menjadi lokomotif dalam pemulihan perekonomian setelah pandemi Covid-19.
Menurutnya, hal itu dapat dicapai dengan catatan sektor konstruksi tetap berjalan atau tidak berhenti di tengah pandemi Covid-19. Alasannya, kondisi di lapangan ada pekerjaan konstruksi yang terhenti meskipun termasuk sektor yang dikecualikan dalam PSBB.
Berdasarkan aturan yang dikeluarkan seperti PSBB di DKI Jakarta terdapat pengecualian terhadap sektor konstruksi. "Namun, faktanya karena kantornya ditutup akhirnya proyek konstruksi setop, harusnya kalau me-refer di negara maju yang sudah terbebas Covid-19 di Vietnam dan Australia, itu boleh

bekerja. Dunia konstruksi tidak boleh berhenti," jelasnya.
Peter menekankan bahwa sektor konstruksi bisa tetap bekerja dengan catatan menerapkan prosedur dan protokol Covid-19, mulai dari manajemen, rantai pasok, hingga pekerjaan di lapangan.
"Saya mendesak pemerintah harus menjalankannya dalam beberapa bulan ke depan agar proyek konstruksi strategis tetap berjalan mengacu ke aturan yang ada, itu sudah detail, instruksi menteri [Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], PSBB," katanya.
Peter menyatakan saat ini yang menjadi kendala adalah karantina wilayah proyek dan pekerja proyek di area tersebut.
Dia menilai perlu modifikasi untuk sektor konstruksi agar tetap bisa berjalan di saat Covid-19, terutama implementasi di lapangan agar sektor konstruksi bisa tetap berjalan. Fakta di lapangan menunjukkan proyek yang sudah lelang ada yang berhenti karena tidak bisa ada pergerakan.
"Ini yang menjadi kegelisahan saya, konsultan bagian dari konstruksi mengambil langkah untuk memulihkan industri ini, menjadi motor. Saya pikir konstruksi bisa jadi lokomotif, jika konstruksi jalan, akan ada *multiplier effect*," Peter melanjutkan sektor konstruksi memiliki sekitar 10 juta tenaga kerja dan menjadi salah

satu penyumbang produk domestik regional bruto (PDRB) yang cukup besar.
Data Badan Pusat Statistik mencatat peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Indonesia terlihat dari persentase terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 10,60% sepanjang kuartal III/2019.
Oleh karena itu, katanya, seharusnya sektor konstruksi bisa tetap berjalan untuk menjaga keberlangsungan industri.
Peter juga mengapresiasi stimulus yang diberikan melalui peraturan Menteri Keuangan (PMK) berupa pengurangan pajak. Namun, menurutnya, sektor konstruksi perlu stimulus lagi.
"PPh [pajak penghasilan] perorangan pada masa Covid-19 dihilangkan, PPh 21 untuk tenaga kerja konstruksi, kalau stimulus ke perusahaan kan tidak mungkin. Jadi, ke orang. Jadi, pajak badan dan personel harus dikurangi," jelasnya.
Bendahara Umum Inkindo Kasim Kasmin menambahkan bahwa pandemi Covid-19 sangat dirasakan di sektor konstruksi seperti omzet yang menurun hingga 50% pada bulan ini.
"Kepastian pembayaran sangat memengaruhi, kejelasan kegiatan mana yang akan dipotong, beban yang seharusnya diringankan dengan relaksasi itu juga belum ada kejelasan, sangat miris, di daerah juga lebih parah lagi karena tidak jalan," jelasnya.
Dia mencatat lebih kurang 70% anggota Inkindo atau sebanyak 5.000 perusahaan akan mengalami ke-

Konstruksi paling cepat bangkit pada era pandemi ini.

sultan sebagai dampak Covid-19. Oleh karena itu, ujarnya, diperlukan kebijakan yang tepat.

PENUNDAAN PROYEK

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memprioritaskan sejumlah proyek yang masuk paket kontraktual sebesar Rp7,83 triliun bisa dikerjakan pada 2021.
Menurutnya, penundaan paket kontraktual yang belum lelang dan pelaksanaannya secara teknis bisa ditunda 2021 menjadi salah satu sumber dari realokasi, *refocusing*, dan penyesuaian program dan anggaran kementerian itu Tahun Anggaran 2020.

"Kami sampaikan untuk informasi kalau penundaan paket-paket kontraktual yang ditunda tahun ini harus jadi prioritas 2021. Jadi, bukan dibatalkan, tetapi ditunda," katanya dalam raker daring dengan Komisi V DPR, Senin (11/5).
Dia menambahkan paket kontraktual tersebut di antaranya rehabilitasi jaringan irigasi daerah tiga-pisi (DI) Baro Raya Pidie, penggantian jembatan Simpang Tohpati-Tjokroaminoto Denpasar dan penataan kawasan waterfront Kota Pariaman di Sumatera Barat. Dalam Si-

gang Kabinet Paripurna tentang RAPBN 2021 beberapa waktu lalu, paparnya, pemerintah telah menyampaikan bahwa tema 2021 adalah pemulihan ekonomi dan program yang harus dimasukkan adalah salah satunya meluncurkan program-program yang ditunda tahun ini.
"Ini sudah *match* dengan Sidang Kabinet Paripurna yang lalu tentang RAPBN 2021 dengan prioritas program pada tahun depan," jelasnya.

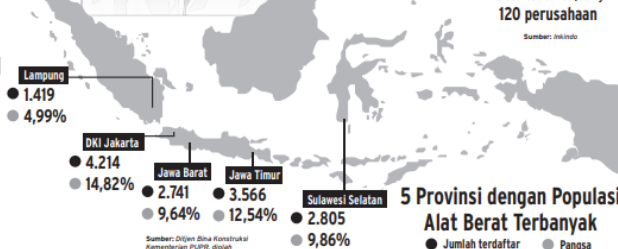
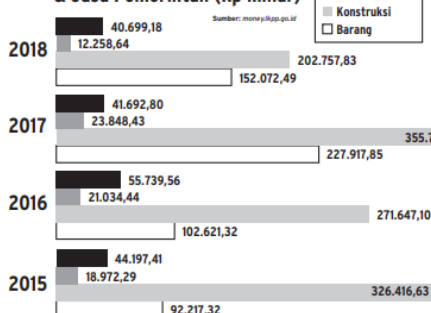
Sementara itu, Anggota DPR Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Bambang Suryadi menyatakan perlu ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan penggunaan anggaran 2021 ketika sudah tepat waktunya.
Menurutnya, pihaknya menyetujui anggaran 2020 dilakukan pengeseran tetapi untuk alokasi anggaran 2021 perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.
"Jangan sampai kita memutuskan anggaran 2021 pada saat sekarang ini, seolah-olah ini untuk anggaran 2021 dan sudah diputuskan bahwa memang akan kita prioritaskan saya kira iya, tapi nanti akan kita diskusikan pada agenda khusus untuk 2021," jelasnya.

Keberlanjutan proyek yang dapat dijamin adalah yang sudah kontrak karena sudah terikat dengan pihak ketiga. Namun, dia menyatakan tidak demikian untuk proyek yang belum kontrak.
"[Untuk] yang sudah dikontrak itu kita terikat, adapun yang belum kontrak tidak boleh ada jaminan ini pasti di 2021," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Basuki mengatakan kegiatan yang ditunda pada 2020 dan masuk program pada 2021 pasti dibicarakan dengan Komisi V DPR.
"Tidak mungkin yang ditunda sekarang langsung otomatis masuk 2021 tanpa RDP dengan Komisi V DPR RI, jadi pasti dibahas kembali," kata Basuki. ■

MELEMAH AKIBAT PANDEMI

Sektor konstruksi yang termasuk di dalamnya jasa konstruksi ternyata cukup besar sumbangannya pada perekonomian Indonesia. Pada kuartal III/2019, peran sektor konstruksi terhadap perekonomian nasional mencapai 10,6% dari total produk domestik bruto (PDB). Kini, aktivitas di sektor konstruksi terpengaruh pandemi virus corona kendati termasuk sektor yang dikecualikan dari pembatasan sosial berskala besar.

Perkembangan Belanja Barang & Jasa Pemerintah (Rp miliar)



Profil Jasa Konsultan di Indonesia

Jumlah anggota:
6.252 perusahaan
Perusahaan afiliasi/asosiasi:
120 perusahaan
Sumber: Inkindo